

**MENUJU PEMBIAYAAN  
PUBLIK  
DALAM NEGERI  
DAN KONTRAK SOSIAL  
UNTUK PENGURANGAN  
DAMPAK BURUK**

---

**Pengarahan ini menguraikan unsur-unsur kunci dalam hal pendanaan publik dalam negeri dan kontrak sosial untuk pengurangan dampak buruk. Informasi ini mengeksplorasi pentingnya kontrak sosial dalam rangka mempertahankan sistem komunitas pengurangan dampak buruk, menjaga pencegahan HIV dan memastikan orang yang menggunakan narkoba dapat mengakses layanan pengurangan dampak buruk secara berkelanjutan selama transisi dari pendanaan donor ke pendanaan dalam negeri.<sup>a</sup>**

---

<sup>a</sup> This briefing draws from Harm Reduction International (2022) Towards domestic public financing and social contracting for harm reduction. London, Harm Reduction International. Available at: <https://hri.global/topics/funding-for-harm-reduction/increasing-funding-for-harm-reduction/>

Pendanaan pengurangan dampak buruk di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (Low Middle Class Income Countries/LMI) mencapai USD 131 juta pada tahun 2019,<sup>1</sup> hanya 5% dari USD 2,7 miliar yang diperkirakan UNAIDS diperlukan setiap tahunnya hingga tahun 2025 dalam rangka memenuhi target global untuk mengatasi HIV, virus hepatitis dan Infeksi Menular Seksual (IMS).<sup>2,3</sup> Kekurangan dana semakin memburuk selama dasawarsa terakhir, karena kebutuhan sumber daya meningkat dan dukungan dari kumpulan kecil donor internasional telah berkurang.<sup>4</sup> Peningkatan investasi dalam negeri dalam program pengurangan dampak buruk berbasis hak asasi manusia yang berkualitas akan menjadi sangat penting jika ingin mencapai target global. Agar berhasil melakukan transisi dari pendanaan donor internasional, pemerintah harus menyediakan pendanaan pengurangan dampak buruk bagi Organisasi Masyarakat Sipil yang berbasis komunitas, dan dipimpin oleh komunitas.

Kontrak sosia<sup>b</sup> adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan proses dimana sumber daya pemerintah diarahkan ke entitas non-pemerintah untuk menyediakan layanan.<sup>5</sup> Hal ini juga disebut sebagai penyediaan layanan sosial atau pendanaan publik untuk program dan layanan yang dilaksanakan oleh organisasi non-pemerintah. Memastikan adanya mekanisme yang memungkinkan sumber daya pemerintah diarahkan ke organisasi ini sangatlah penting karena di banyak negara, mayoritas pengurangan dampak buruk sebagian besar dilaksanakan Organisasi Masyarakat Sipil yang berbasis komunitas, dan dipimpin oleh komunitas.

Tiga model pendanaan utama yang digunakan oleh pemerintah untuk kontrak sosial adalah:

1. Pendanaan berbasis hasil: Pembayaran dilakukan setelah pencapaian hasil. Hal ini dapat dilakukan dengan organisasi yang lebih besar yang memiliki dana inti yang cukup untuk membiayai kegiatan mereka di awal, namun tidak dengan organisasi yang lebih kecil dengan dana yang terbatas.
2. Pengadaan dan kontrak: Pembayaran dilakukan pada waktu yang ditentukan berdasarkan tingkat penyediaan dan jadwal layanan sesuai kontrak. Penggantian (reimbursement) dari skema asuransi juga dapat masuk dalam kategori ini.
3. Hibah (atau model kapitasi): Dana disediakan di muka dan organisasi memberikan laporan tentang kegiatannya. Model ini dapat memberikan beberapa fleksibilitas dan menunjukkan tingkat kepercayaan pada penerima hibah. Model juga digunakan di mana jumlah klien yang mungkin dijangkau oleh suatu layanan dalam jangka waktu tertentu sudah diketahui.

Dengan kontrak sosial, satu model tidak dapat digunakan untuk semua situasi dan

b While this briefing uses the term social contracting, we recognise that this term may not be globally understood and is not often explicitly used within national or local regulations, laws, or policies that support its implementation.

kondisi. Setiap negara menggunakan pendekatan kontrak sosial yang dikembangkan dan didefinisikan dalam konteks sosial, hukum, dan kebijakannya. Mekanisme kontrak sosial yang berhasil untuk pengurangan dampak buruk, dan khususnya, pendekatan yang dipimpin oleh komunitas, kemungkinan besar akan meliputi penggunaan proses yang setara, adil, dan transparan serta akuntabilitas pemerintah. Unsur-unsur ini sangat penting bagi komunitas yang dikriminalisasi dan termarginalisasi di tengah masyarakat dan oleh undang-undang serta kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang pada saat bersamaan menyediakan dana. Faktor pendukung lainnya untuk kontrak sosial untuk pengurangan dampak buruk termasuk komitmen pemerintah untuk mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (Universal Health Coverage/UHC) dan pendanaan dalam negeri yang andal dan dapat diprediksi untuk pelaksanaan program HIV.

Prasyarat utama dalam meningkatkan kontrak sosial untuk pengurangan dampak buruk sudah ada. Beberapa negara menggunakan praktik kontrak sosial untuk mendanai pengurangan dampak buruk dan pengalaman ini dapat dibagikan dan dijadikan sebagai pembelajaran. Semakin banyak negara yang memasukkan pengurangan dampak buruk dalam kebijakan nasional dan menerapkan program prioritas pengurangan dampak buruk, meskipun seringkali didanai oleh donor internasional.<sup>6</sup> Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil sudah menjadi pelaksana utama di banyak negara. Yang penting, tersedianya dukungan dari lembaga seperti Global Fund dan UNAIDS bagi negara-negara yang mengambil langkah penerapan kontrak sosial untuk pengurangan dampak buruk.

Memperkenalkan dan meningkatkan mekanisme kontrak sosial tidak boleh menunggu sampai suatu negara beralih dari pendanaan donor internasional ke pendanaan dalam negeri. Persiapan menuju sistem masyarakat yang tangguh di masa depan melalui transisi ini harus dimulai lebih awal untuk memungkinkan reformasi hukum dan penerapan mekanisme baru ataupun adaptasi mekanisme yang telah ada.

Rencana transisi untuk beralih dari pendanaan internasional ke pembiayaan dalam negeri harus melibatkan para aktor masyarakat sipil yang dipimpin oleh komunitas dan berbasis komunitas. Mereka harus memastikan bahwa struktur dan mekanisme siap untuk menyalurkan dana publik dalam negeri ke organisasi-organisasi ini dalam rangka menyediakan program pengurangan dampak buruk berbasis hak asasi manusia yang berkualitas. Juga harus ada dukungan dalam negeri untuk pemantauan dan advokasi yang dipimpin oleh masyarakat, yang diberikan dengan cara yang tidak mengurangi kemandirian dan kemampuan untuk meneliti dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Bahkan dengan adanya mekanisme kontrak sosial yang berlaku, selama orang yang menggunakan narkoba dikriminalisasi dan dimarginalkan di tengah masyarakat, baik oleh undang-undang maupun kebijakan, maka kemungkinan besar mereka akan mengalami marginalisasi yang sama dalam prioritas pendanaan publik. Komunitas dan masyarakat sipil yang melakukan advokasi harus didukung untuk menyerukan dekriminalisasi dan pengurangan dampak buruk untuk didukung secara politis.

# REKOMENDASI

Mekanisme dan pendanaan kontrak sosial dapat menawarkan kerangka kerja penting untuk mempertahankan sistem komunitas pengurangan dampak buruk, menjaga capaian pencegahan HIV yang telah diraih sejauh ini, dan memastikan akses ke layanan pengurangan dampak buruk tetap berlanjut selama transisi bagi orang yang menggunakan narkotika suntik. Untuk merumuskan dan menerapkan kontrak sosial untuk pengurangan dampak buruk yang sukses, kami menawarkan rekomendasi berikut di bawah ini bagi Pemerintah, Donor, Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil.

---

## **Rekomendasi untuk instansi pemerintah dan mekanisme nasional terkait HIV, virus hepatitis dan kebijakan narkoba:**

- ❑ Memastikan mekanisme kontrak sosial tersedia untuk mendanai komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil
- ❑ Menyertakan komitmen yang berani untuk beralih ke pendanaan dalam negeri dalam strategi kebijakan HIV, hepatitis, dan narkoba nasional
- ❑ Membangun hubungan dan dialog terbuka dengan mitra teknis dan donor internasional tentang transisi menuju pendanaan dalam negeri

## **Rekomendasi untuk donor internasional dan badan teknis:**

- ❑ Menyediakan platform pembelajaran tentang kontrak sosial
- ❑ Menekankan pentingnya memperkenalkan mekanisme kontrak sosial sejak dini dan dengan keterlibatan yang berarti dari masyarakat
- ❑ Memberikan dukungan teknis kepada pemerintah dalam memperkenalkan kontrak sosial untuk pengurangan dampak buruk
- ❑ Mendukung dan mendorong pemerintah dan mekanisme nasional tentang kebijakan HIV, hepatitis, dan narkoba untuk memasukkan komitmen yang tegas untuk beralih ke pendanaan dalam negeri dalam strategi nasional
- ❑ Memberikan dukungan teknis dan menjembatani pendanaan melalui transisi
- ❑ Menyediakan pendanaan inti dan fleksibel kepada Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil yang memungkinkan advokasi responsif dalam kondisi kebijakan yang selalu berubah
- ❑ Membangun kapasitas Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil dalam menerima pendanaan pemerintah dan terlibat dalam advokasi anggaran
- ❑ Mengumpulkan dan membagikan data tentang kontrak sosial

## **Rekomendasi untuk Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil:**

- ❑ Menilai status, ruang lingkup, dan keinginan untuk kontrak sosial saat ini
- ❑ Mengatasi kesenjangan kapasitas untuk memastikan organisasi Anda siap menerima pendanaan dalam negeri untuk pengurangan dampak buruk
- ❑ Menyertakan kegiatan penelitian, advokasi, dan pemantauan tentang kontrak sosial dalam permintaan pendanaan dan bantuan teknis
- ❑ Melakukan advokasi untuk kontrak sosial yang berfungsi baik untuk pengurangan dampak buruk dan untuk Organisasi Masyarakat Sipil yang dipimpin dan berbasis komunitas
- ❑ Membentuk aliansi advokasi dengan Komunitas dan Organisasi Masyarakat Sipil lainnya

# REFERENCES

- 1 Harm Reduction International (2021) Failure to Fund: The continued crisis for harm reduction funding in low- and middle-income countries. London: Harm Reduction International
- 2 UNAIDS (2021) Global AIDS Strategy, End Inequalities. End AIDS. Geneva: UNAIDS.
- 3 World Health Organization (2022) Global health sector strategies on, respectively, HIV, viral hepatitis and sexually transmitted infections for the period 2022-2030. Geneva: World Health Organization
- 4 Harm Reduction International (2021) Failure to Fund: The continued crisis for harm reduction funding in low- and middle-income countries. London: Harm Reduction International
- 5 Open Society Foundations, UNDP and the Global Fund (2017) A global consultation on social contracting: working toward sustainable responses to HIV, TB, and malaria through government financing of programmes implemented by civil society. A meeting report. Available from [http://shifhivfinancing.org/wp-content/uploads/2018/06/Social\\_Contracting\\_Report\\_English.pdf](http://shifhivfinancing.org/wp-content/uploads/2018/06/Social_Contracting_Report_English.pdf)
- 6 Harm Reduction International (2022) Global State of Harm Reduction 2022. London, Harm Reduction International.

